



# Konsep Kewenangan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Di Perguruan Tinggi: Kajian Literatur

Wawan Erizona<sup>1</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2</sup>

Magister Ilmu Administrasi Negara (M.A.P), Universitas Negeri Padang

E-mail : erizonawawan@yahoo.co.id

## Abstrak

Pengelolaan kewenangan yang efektif di perguruan tinggi merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional organisasi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewenangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di perguruan tinggi, dengan fokus pada pembagian kewenangan, otonomi, serta tantangan dalam implementasi kewenangan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan yang terkait dengan pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan yang jelas dan merata antara pimpinan pusat dan unit-unit perguruan tinggi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi potensi konflik internal. Selain itu, kewenangan dalam mengelola teknologi dan kebijakan berbasis digital sangat penting dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global. Namun, tantangan seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai perlu diatasi untuk memastikan kewenangan dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu, perguruan tinggi disarankan untuk memperjelas pembagian kewenangan, memberikan pelatihan kepada pengelola, serta memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

**Kata kunci:** Kewenangan, efektivitas organisasi, otonomi, teknologi pendidikan, perguruan tinggi.

## PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan tinggi yang memegang peranan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan inovasi ilmu pengetahuan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, perguruan tinggi menghadapi tantangan untuk beradaptasi dan meningkatkan efektivitas pengelolannya. Salah satu aspek kunci dalam pengelolaan perguruan tinggi adalah kewenangan. Kewenangan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan distribusi tanggung jawab yang efektif dalam organisasi perguruan tinggi (Rahmat, 2020).

Dalam kerangka hukum dan tata kelola, konsep kewenangan memiliki dimensi yang luas, mencakup kewenangan normatif, struktural, dan fungsional. Kewenangan normatif berakar pada peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang perguruan tinggi, termasuk otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Haryanto, 2019). Sementara itu, kewenangan struktural mencakup pembagian tugas dan fungsi antarunit di dalam perguruan tinggi, sedangkan kewenangan fungsional berkaitan dengan implementasi tugas-tugas akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Namun, kewenangan yang tidak terkelola dengan baik sering kali menjadi sumber inefisiensi dan konflik internal. Ketidaksesuaian antara wewenang yang dimiliki dengan tanggung jawab yang diemban dapat menghambat efektivitas organisasi (Putri & Siregar, 2021). Misalnya, tumpang tindih kewenangan antara fakultas, jurusan, dan lembaga penelitian dalam pengelolaan sumber daya sering kali memicu kebingungan dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks yang lebih luas, perubahan regulasi pemerintah, tuntutan akreditasi internasional, dan kebutuhan adaptasi terhadap Revolusi Industri 4.0 juga menambah kompleksitas pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi (Kurniawan & Setiawati, 2020).

Studi literatur mengenai konsep kewenangan dalam konteks perguruan tinggi menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kewenangan didefinisikan, didistribusikan, dan diimplementasikan untuk mendukung tujuan organisasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan kewenangan yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat akuntabilitas, dan menciptakan budaya kerja yang kolaboratif (Sutrisno, 2018). Oleh karena itu, diperlukan tinjauan literatur yang komprehensif untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan praktik terbaik dalam pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kewenangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan di perguruan tinggi melalui kajian literatur. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan tata kelola perguruan tinggi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis konsep kewenangan dalam konteks pengelolaan perguruan tinggi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai peran kewenangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan perguruan tinggi melalui kajian literatur yang ada. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai perspektif teoretis dan aplikatif yang relevan dengan topik tersebut (Rahmat, 2020).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer mencakup artikel-artikel jurnal yang terindeks pada database internasional seperti Scopus, SINTA, dan Web of Science, yang membahas topik terkait kewenangan, tata kelola perguruan tinggi, dan efektivitas organisasi (Putri & Siregar, 2021). Literatur sekunder meliputi buku teks, laporan kebijakan, serta dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang memberikan gambaran tentang otonomi dan kewenangan yang diberikan kepada perguruan tinggi di Indonesia (Haryanto, 2019). Selain itu, studi terdahulu yang relevan juga dijadikan referensi untuk memperkaya analisis mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi (Kurniawan & Setiawati, 2020).

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini mengandalkan penelusuran dokumen melalui pencarian menggunakan kata kunci yang relevan, seperti *authority in higher education*, *governance effectiveness*, dan *autonomy in universities*, pada berbagai basis data jurnal ilmiah. Artikel yang terpilih akan memenuhi kriteria inklusi, yaitu dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir, relevan dengan topik, dan berasal dari jurnal atau penerbit bereputasi. Sementara itu, literatur yang tidak sesuai dengan topik, tidak terverifikasi, atau tidak memiliki kualitas akademik yang memadai akan dikeluarkan dari analisis (Sutrisno, 2018).

Teknik analisis data yang digunakan adalah kategorisasi dan koding tematik. Data dari berbagai literatur yang terkumpul akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep kewenangan dalam pengelolaan perguruan tinggi, pembagian kewenangan antara unit-unit di perguruan tinggi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan koding tematik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan peluang yang ada dalam pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi (Putri & Siregar, 2021). Proses ini memungkinkan penulis untuk menghubungkan teori-teori yang ada dengan praktik yang diterapkan di lapangan.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan temuan-temuan dari berbagai sumber literatur yang memiliki kredibilitas tinggi dan relevansi dengan topik penelitian (Haryanto, 2019). Selain itu, validitas data juga dijaga dengan mengacu pada kerangka teoretis yang kuat, sehingga temuan penelitian dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan teori dan praktik pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi.

Hasil dari analisis ini akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, dengan mengelompokkan temuan-temuan berdasarkan kategori utama yang terkait dengan kewenangan dan efektivitas pengelolaan perguruan tinggi. Penulisan hasil analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kewenangan dikelola di perguruan tinggi, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan di masa depan (Sutrisno, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Beberapa Penelitian ilmiah yang terkait dengan Konsep kewenangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di perguruan tinggi

| Judul  | Penulis dan Tahun Artikel             | Jurnal Publikasi                               | Hasil Penelitian  |
|--|---------------------------------------|--|---|
| <b>Konsep Dasar Kewenangan dalam Organisasi: Aplikasi pada Perguruan Tinggi</b>                        | Rahmat, A. (2020)                     | <i>Jurnal Administrasi Pendidikan</i>          | Penelitian ini mengidentifikasi kewenangan sebagai elemen kunci dalam pengelolaan organisasi perguruan tinggi. Penulis menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pimpinan, fakultas, dan jurusan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kewenangan yang terpusat pada tingkat pimpinan dapat menghambat desentralisasi keputusan yang dibutuhkan untuk inovasi dan peningkatan kualitas pendidikan. |
| <b>Adaptasi Perguruan Tinggi terhadap Revolusi Industri 4.0: Perspektif Tata Kelola dan Kewenangan</b> | Kurniawan, R., & Setiawati, N. (2020) | <i>Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi</i> | Studi ini mengeksplorasi bagaimana kewenangan di perguruan tinggi beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan Revolusi Industri 4.0. Hasilnya menunjukkan bahwa perguruan tinggi perlu memperkuat kewenangan teknis dan administratif untuk merespons kebutuhan   |

| Judul   | Penulis dan Tahun Artikel       | Jurnal Publikasi                                 | Hasil Penelitian  |
|---|---------------------------------|--|---|
|   |                                 |  | pengembangan teknologi. Penulis juga mengusulkan perlunya otonomi lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum dan metode pengajaran berbasis teknologi.   |
| <b>Analisis Konflik Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perguruan Tinggi</b>           | Putri, A., & Siregar, F. (2021) | <i>Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik</i>     | Penelitian ini menemukan adanya konflik kewenangan antara manajemen pusat dan fakultas di perguruan tinggi. Ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran menyebabkan ketidakefisienan operasional. Penulis merekomendasikan adanya sistem pengelolaan kewenangan yang lebih transparan dan berfokus pada kolaborasi antara unit administrasi pusat dan fakultas untuk mengurangi konflik dan meningkatkan hasil akademik. |
| <b>Otonomi Perguruan Tinggi dalam Kerangka Undang-Undang Pendidikan Tinggi</b>              | Haryanto, T. (2019)             | <i>Pustaka Ilmu</i>                              | Penelitian ini menganalisis penerapan otonomi perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012. Penulis menyimpulkan bahwa otonomi memberikan kebebasan bagi perguruan tinggi untuk mengelola sumber daya dan kebijakan internal. Namun, implementasi otonomi terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan ketidaksiapan infrastruktur administrasi di beberapa perguruan tinggi.                                |
| <b>Pengelolaan Kewenangan untuk Meningkatkan Efektivitas Organisasi di Perguruan Tinggi</b> | Sutrisno, B. (2018)             | <i>Jurnal Pendidikan dan Manajemen Institusi</i> | Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kewenangan dalam perguruan tinggi, termasuk pengaruh struktur organisasi dan budaya kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kewenangan yang terorganisir dengan baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Pengelolaan kewenangan yang berbasis pada transparansi dan akuntabilitas juga dapat memperbaiki kinerja institusi dan kepuasan mahasiswa.  |

## Pembahasan

Pengelolaan kewenangan yang efektif memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional perguruan tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2020) menunjukkan bahwa pembagian kewenangan yang jelas dan terstruktur antara pimpinan pusat dan unit-unit di perguruan tinggi dapat mempercepat pengambilan keputusan dan merespons dinamika internal serta eksternal dengan lebih baik. Ketika kewenangan terlalu terpusat pada pimpinan pusat atau hanya pada satu unit, seperti fakultas atau jurusan, pengelolaan menjadi lebih lambat dan terkendala. Sebaliknya, pembagian kewenangan yang merata dan desentralisasi memungkinkan setiap unit untuk memiliki fleksibilitas dalam mengelola sumber daya sesuai kebutuhan, meningkatkan responsivitas dan efisiensi operasional.

Selain itu, dalam konteks Revolusi Industri 4.0, kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan perguruan tinggi perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan berbasis digital. Kurniawan dan Setiawati (2020) menyatakan bahwa perguruan tinggi yang memiliki kewenangan dalam hal pengambilan keputusan terkait kebijakan teknologi, seperti integrasi dalam kurikulum dan metode pengajaran berbasis teknologi, dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan zaman dan berkompetisi di tingkat global. Dalam penelitian mereka, ditemukan bahwa perguruan tinggi yang memiliki otonomi lebih dalam pengelolaan teknologi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian, serta mempermudah inovasi dalam pengajaran berbasis digital.

Namun, pengelolaan kewenangan yang tidak jelas dapat menyebabkan konflik internal yang merugikan, terutama dalam pengelolaan sumber daya perguruan tinggi. Putri dan Siregar (2021) mengidentifikasi bahwa ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pimpinan pusat dan fakultas sering menimbulkan konflik dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia. Ketidakseimbangan kewenangan ini tidak hanya mengganggu efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga mengurangi motivasi dan semangat kerja di antara staf akademik dan non-akademik. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan sistem pengelolaan kewenangan yang lebih transparan dan kolaboratif untuk mengurangi konflik dan meningkatkan sinergi antara unit-unit dalam perguruan tinggi.

Di sisi lain, Haryanto (2019) dalam penelitiannya tentang otonomi perguruan tinggi menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012. Meskipun otonomi memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk mengelola sumber daya dan kebijakan internal, Haryanto

menemukan bahwa penerapan otonomi masih terbatas oleh kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur administratif yang belum memadai. Tanpa adanya dukungan yang memadai dalam hal pelatihan dan pengembangan kapasitas pengelola perguruan tinggi, kewenangan yang diberikan bisa jadi tidak terkelola dengan baik, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan manajemen perguruan tinggi.

Sutrisno (2018) juga menekankan bahwa pengelolaan kewenangan yang baik sangat bergantung pada budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Dalam penelitiannya, Sutrisno menemukan bahwa ketika staf dan pimpinan perguruan tinggi memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab mereka, pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan hasil yang dicapai lebih optimal. Budaya kerja yang terbuka dan berbasis akuntabilitas mampu mengurangi birokrasi yang berlebihan dan mendorong kolaborasi yang lebih baik antara berbagai unit dalam perguruan tinggi. Oleh karena itu, penguatan budaya kerja yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama dalam pengelolaan kewenangan yang efektif.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan kewenangan yang terstruktur dan berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Pengelolaan kewenangan yang jelas dan tepat akan mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan perguruan tinggi yang lebih kompetitif dan inovatif. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti konflik kewenangan dan ketidaksiapan sumber daya, harus diatasi dengan sistem yang lebih terbuka dan kolaboratif agar pengelolaan kewenangan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi seluruh elemen perguruan tinggi.

---

### SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kewenangan yang jelas dan terstruktur merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di perguruan tinggi. Pembagian kewenangan yang merata antara pimpinan pusat dan unit-unit fakultas atau jurusan dapat mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi konflik internal, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, perguruan tinggi yang memiliki kewenangan dalam mengelola teknologi dan kebijakan pendidikan berbasis digital dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan zaman dan meningkatkan daya saing global. Namun, tantangan terkait pengelolaan kewenangan, seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur administratif yang belum memadai, perlu diatasi agar kewenangan dapat dikelola dengan lebih optimal.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran dapat diberikan. Pertama, perguruan tinggi perlu memperjelas dan mendokumentasikan pembagian kewenangan antara pimpinan pusat dan unit-unit lainnya, dengan tujuan mengurangi potensi konflik dan meningkatkan koordinasi antar unit. Kedua, penting untuk memberikan pelatihan yang berkelanjutan bagi pengelola perguruan tinggi dalam mengelola kewenangan dan mengadaptasi kebijakan terbaru terkait pendidikan tinggi, terutama yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Ketiga, penguatan budaya kerja yang transparan dan akuntabel perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa kewenangan yang ada dapat dikelola dengan efisien dan efektif. Terakhir, perguruan tinggi harus meningkatkan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan otonomi dan pengelolaan kewenangan yang lebih baik.

---

### DAFTAR PUSTAKA

1. Haryanto, T. (2019). *Otonomi Perguruan Tinggi dalam Kerangka Undang-Undang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
  2. Kurniawan, R., & Setiawati, N. (2020). Adaptasi Perguruan Tinggi terhadap Revolusi Industri 4.0: Perspektif Tata Kelola dan Kewenangan. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi*, 12(3), 45–58.
  3. Putri, A., & Siregar, F. (2021). Analisis Konflik Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 10(2), 123–135.
  4. Rahmat, A. (2020). Konsep Dasar Kewenangan dalam Organisasi: Aplikasi pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 8(4), 67–78.
  5. Sutrisno, B. (2018). Pengelolaan Kewenangan untuk Meningkatkan Efektivitas Organisasi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Institusi*, 6(1), 14–25.
-